



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Bappeda Tahun 2023-2026 dapat terselesaikan.

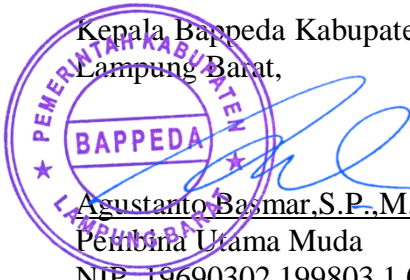
Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan kewajiban dalam mendukung visi dan misi Bupati Lampung Barat periode 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periode 5 (lima) tahun dari RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 124 menyebutkan bahwa renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, menjadi pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas.

Liwa, Februari 2022

Kepala Bappeda Kabupaten
Lampung Barat,


Agustanto Basmar, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690302 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.2. Landasan Hukum.....	I.3
1.3. Maksud dan Tujuan	I.6
1.4. Sistematika Penulisan	I.7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi	II.1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II.34
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.43
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.1
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III.3
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.8
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III.10
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV.1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	IV.1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V.1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI.1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII. PENUTUP	VIII.1
LAMPIRAN	

TABEL

2.1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	II.34
2.2.	Keadaan ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II.34
2.3.	Keadaan ASN Berdasarkan Pendidikan.....	II.35
2.4.	Keadaan ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang.....	II.35
2.5.	Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda.....	II.37
2.6.	Kendaraan Dinas.....	II.39
2.7.	Dokumen Perencanaan Bappeda Tahun 2023-2026	II.40
2.8.	Dokumen Statistik Pembangunan Manusia Tahun 2023-2026	II.40
2.9.	Pencapaian Kinerja Bappeda Kab. Lampung Barat Periode Renstra Sebelumnya	II.41
3.0.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kab. Lam-Bar Periode Renstra Sebelumnya.....	II.41
3.1.	Pemetaan Permasalahan terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam memberikan Pelayanan Bidang Perencanaan.....	III.2
3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III.5
3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Lampung Barat Terhadap Sinergitas Pencapaian Sasaran Renstra Bappenas.....	III.7
3.4.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Lampung Barat Terhadap Sinergitas Pencapaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi.....	III.8
3.5.	Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat Berdasarkan Analisa RTRWK.....	III.10
3.6.	Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat Berdasarkan Analisis KLHSRPJMD.....	III.12
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	IV.3
7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.....	VII.2

I PENDAHULUAN

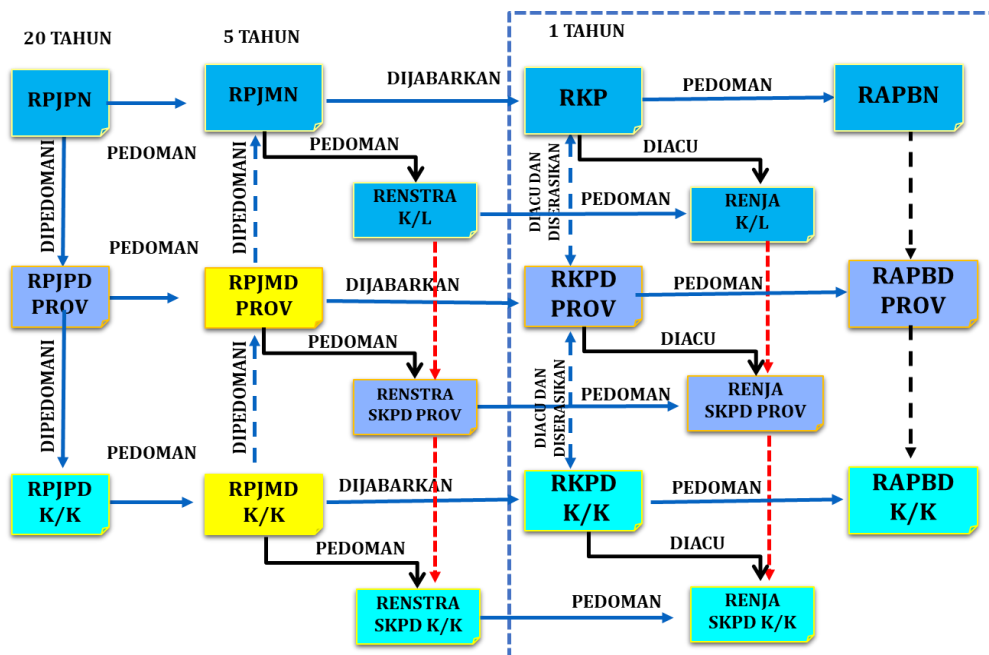
1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, integrative, dan tepat sasaran, diperlukan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana setiap daerah otonom harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah


(RPD). Renstra Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun sebagai rencana tindak atau pedoman bagi OPD beserta jajarannya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPD dan sebagai bahan masukan dalam mengukur Kinerja Instansi Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam proses penganggaran pembangunan



Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2022 ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Renstra OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 4 (empat) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, merupakan rencana pembangunan Dearah OPD yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Lampung Barat yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Lampung Barat Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang

- 
- Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi Bappeda Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu empat tahun ke depan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang komprehensif dan penentuan program dan pilihan-pilihan kegiatan tahunan. Sedangkan Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dirumuskan:

1. Untuk mensinergikan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat untuk 4 (empat) tahun ke depan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Lampung Barat.
4. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder.

5. Renstra Bappeda menjadi rujukan bagi seluruh aparatur Bappeda dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum penyusunan Rencana Strategis OPD meliputi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika Penulisan sehingga memudahkan pemahaman.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi

dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Propinsi, Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan tujuan dan sasaran rencanapembangunandaerah pada Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan kebijakan strategis Bappeda Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

II

Gambaran Pelayanan PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

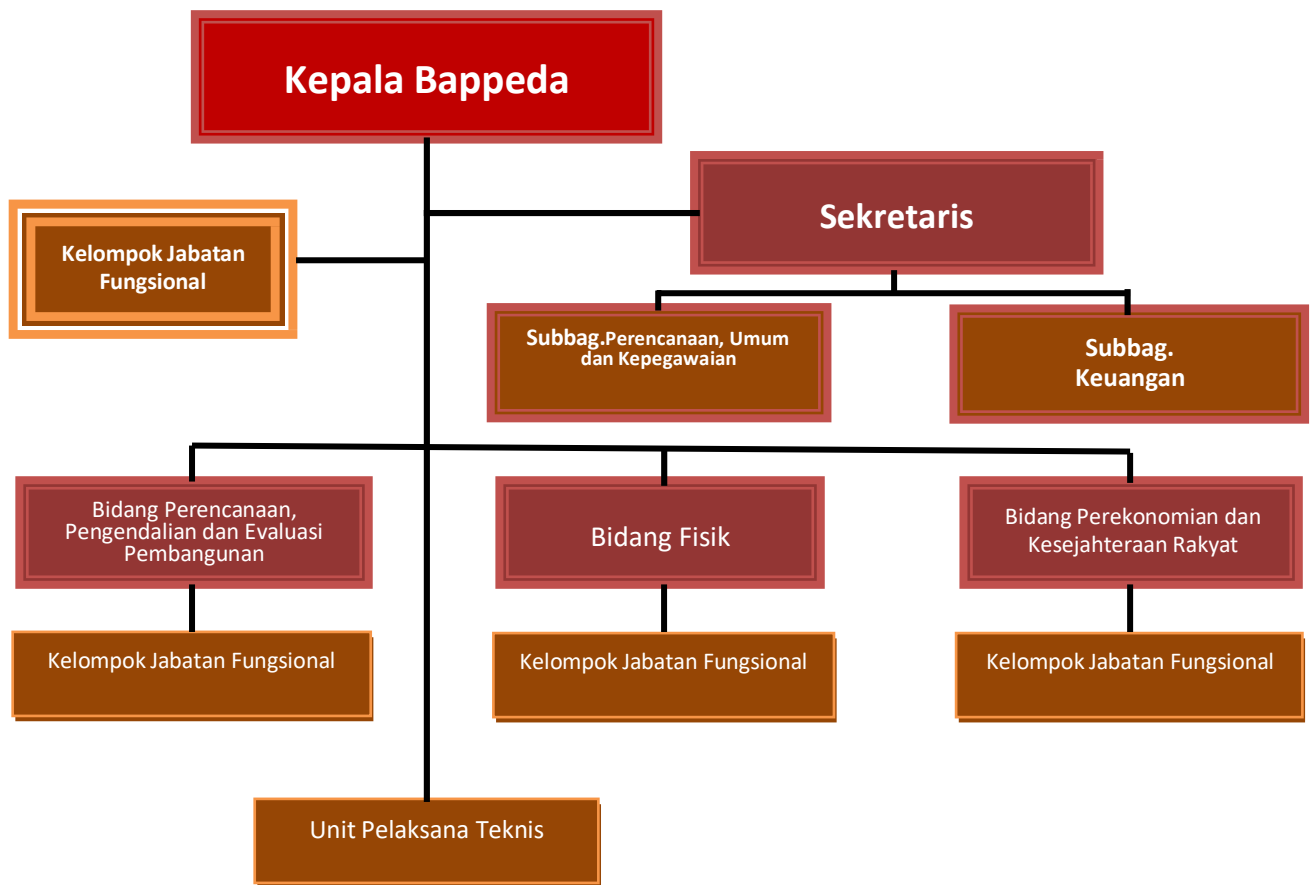
BAPPEDA merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016, yang berperan sebagai unsure penunjang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat adalah :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bappeda
Kabupaten Lampung Barat



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Fisik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

a. KEPALA BADAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- 2) perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perencanaan pembangunan;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pembangunan;

- 4) pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pembangunan;
- 5) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 6) penyusunan Perencanaan dan program pembangunan tahunan disegala sektor;
- 7) pengoordinasian perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal, dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemda, kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam daerah kabupaten;
- 8) penyiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- 9) penyiapan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten;
- 10) pelaksanaan koordinasi perencanaan penataan ruang lintas sektoral;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- 12) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat Bappeda Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Bappeda. Sekretariat Bappeda mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Bappeda serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Bappeda mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bappeda.
- 2) Pelaksanaan tugas administratif umum dan administrasi kepegawaian,perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan.
- 3) Pelaksanaan administrasi dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekretariat dan lingkup Bappeda.

Rincian tugas Sekretaris Bappeda adalah sebagai berikut :

- ❖ Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- ❖ Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;

- ❖ Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- ❖ Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;
- ❖ Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- ❖ Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- ❖ Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- ❖ Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- ❖ Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- ❖ Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai prestasi kerja PNS/ASN di lingkup Sekretariat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku

kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Bappeda Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

b.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian


Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian Perencanaan, umum, dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi umum administrasi kepegawaian dan perencanaan;
- 2) Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan badan; dan
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- ❖ Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan

- Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- ❖ Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan perencanaan;
 - ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sub bagian umum dan perencanaan;
 - ❖ Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - ❖ Memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
 - ❖ Melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
 - ❖ Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan;
 - ❖ Mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Badan;
 - ❖ Melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Badan;
 - ❖ Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
 - ❖ Menyiapkan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana APBD dan APBN dengan

- 
- melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- ❖ Menyusun Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - ❖ Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program badan, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
 - ❖ Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
 - ❖ Menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;
 - ❖ Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - ❖ Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.2 Kepala Sub Bagian Keuangan


Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan badan;
- 3) Penyusunan laporan keuangan badan dan pelayanan bidang keuangan; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bagian keuangan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan subbidang keuangan;
- ❖ Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- ❖ Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- ❖ Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah

- 
- Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- ❖ Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - ❖ Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - ❖ Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - ❖ Melaksanakan akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - ❖ Menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
 - ❖ Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan.
 - ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Rincian Tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan sebagai berikut :

- ❖ Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- ❖ Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- ❖ Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- ❖ Menyusun konsep perumusan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- ❖ Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data, analisa data dan menyusun Statistik serta dokumentasi potensi Kabupaten;
- ❖ Melaksanakan koordinasi penelitian di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- ❖ Mengkoordinasikan dan mengadakan kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya;
- ❖ Menghimpun dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;
- ❖ Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- ❖ Menyusun data statistik hasil pembangunan dan mendokumentasikan serta melakukan pengembangan dan perencanaan menyeluruh;
- ❖ Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

d. Bidang Fisik

Bidang Fisik mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Bappeda di bidang di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Fisik mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- 
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rincian tugas Bidang Fisik adalah sebagai berikut :

- ❖ Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang fisik yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- ❖ Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah, tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup antar OPD, Instansi Vertikal dan

Kecamatan-Kecamatan yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Lampung Barat;

- ❖ Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan data perencanaan dan program pembangunan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Mengumpulkan dan menyusun hasil pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan perencanaan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Menyiapkan bahan untuk inventarisasi, pengumpulan dan penyajian data informasi yang berkaitan perencanaan pembangunan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Bidang Fisik berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan

sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Fisik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Rincian tugas Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

- ❖ Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- ❖ Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;
- ❖ Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- ❖ Menyusun bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- ❖ Mengkoordinasikan dan mesinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat`;
- ❖ Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program kerja pembangunan di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- ❖ Melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan analisa data informasi pembangunan pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- ❖ Melakukan perencanaan kerjasama antar daerah lintas sektoral di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan potensi daerah;

- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.2 SDM

Berdasarkan data per Oktober Tahun 2022 keadaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Barat tercatat sebanyak 28 orang Aparatur Sipil Negera, 15 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela sehingga total sumber daya manusia dilingkungan Bappeda Kabupaten Lampung Barat berjumlah 43 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah	Persentase (%)
1.	PNS	28	70%
2.	THLS	15	30%
	Jumlah	43	100%

Sumber : Bappeda Oktober 2022

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat golongan sebagaimana tabel berikut ini :

:

Tabel 2.2

Keadaan ASN berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	19	75%
2.	Perempuan	9	25%
3.	Jumlah	28	100%

Sumber : Bappeda Oktober 2022

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Keadaan ASN berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S3	-	-
2.	S2	11	39,28%
3.	Sarjana (S1)	15	53,58%
4.	D3	1	3,57%
5.	SLTA	1	3,57%
6.	SMP	-	-
7.	SD	-	-
	Jumlah	28	100%

: Bappeda Bappeda Oktober 2022

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan Ruang sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 2.4

Keadaan ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang

No.	Pangkat, Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
	Pembina Tingkat I, IV/b	1
	Pembina, IV/a	5
	Jumlah	7
2.	Penata Tingkat I, III/d	5
	Penata, III/c	8
	Penata Muda Tk.I, III/b	1
	Penata Muda, III/a	7
	Jumlah	21
3.	Pengatur Tingkat I, II/d	-
	Pengatur, II/c	-
	Pengatur Muda Tk.I, II/b	-
	Pengatur Muda, II/a	-
	Jumlah	-
4.	Juru muda, I/a	-
	Jumlah	-
JUMLAH (1+2+3+4)		28

Sumber : Bappeda Oktober 2022

Dari data tabel sumber daya manusia diatas bila disandingkan dengan struktur organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan maka, personil yang menduduki Jabatan struktural sebanyak 7 orang atau 25%, dibandingkan dengan kelompok jabatan fungsional dan staf pelaksana sebanyak 21 orang atau 75% hal ini didasari oleh Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai

dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan system *Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Mengacu pada *job description* dan *job analysis* bahwa tiap-tiap jabatan eselon IV setara dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Koordinator dibawah kesekretariatan dan Bidang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi minimal 3 orang personil dengan tingkat kualifikasi pendidikan Sarjana atau Pasca Sarjana. Sesungguhnya komposisi ideal total personil Bappeda dengan Struktur Organisasi saat ini adalah 49 orang ditambah dengan kualifikasi tenaga fungsional perencanaan 10% dan UPT data. Tuntutan pekerjaan mengharuskan pegawai senantiasa menguasai informasi dan regulasi terkini dalam merumuskan setiap kebijakan dan tugas kedinasan, tetapi tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Upaya untuk meningkatkan performa kinerja pegawai sebelum melakukan kerja, idealnya mengikuti diklat terlebih dahulu. Berikut Diklat/kursus yang pernah diikuti personil Bappeda yaitu :

- ❖ Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan Dasar (TMP-PD)
- ❖ Manajemen Strategis Produk Unggulan Daerah
- ❖ Perencanaan Pembangunan Produk Domestik Regional Bruto
- ❖ Orientasi Peningkatan Kapasitas Manajemen Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- ❖ Kursus Rencana Teknik Penghijauan
- ❖ Kursus Sistem Informasi Pesisir
- ❖ Kursus Sistem Informasi Geografis
- ❖ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

- ❖ TOT Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
- ❖ Sistem Tata Usaha Keuangan Daerah
- ❖ Diklat Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota se - Indonesia
- ❖ Penyusunan RASK/DASK dan RAPBD pola Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002
- ❖ Diklat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- ❖ Teknik Manajemen Perencana Pembangunan Lanjutan (TMP-PL)
- ❖ Workshop *Planning Financial Province and District*
- ❖ Kursus Keuangan Daerah (KKD) 4 bulan
- ❖ Diklat Permendagri No. 13 Tahun 2006
- ❖ Diklat Permendagri No. 54 Tahun 2010
- ❖ Bimtek Penyusunan RPJMD
- ❖ Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- ❖ Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Online
- ❖ Bimtek Penyusunan Evaluasi Renja SKPD
- ❖ Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG)

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Drone	1
2	Gorden	2
3	Kanopi Garasi	1
4	UPS Server	2

5	UPS	2
6	Stabilizer	2
7	Sound System (SP Alpha Sound WLS 15')	1
8	Sound System (SP Hard Guset 15')	2
9	Sound System (Tiang SPK 15')	3
10	Mobil Minibus	2
11	Mobil Pick Up	1
12	Motor Roda 2	6
13	Meja Biro	3
14	Meja $1/2$ Biro	32
15	Kursi Lipat	140
16	Meja Komputer	7
17	Kursi Putar	17
18	Meja Rapat Besar	12
19	Meja Rapat Kecil	3
20	Kursi Tamu	2
21	Sice	1
22	Lemari Buku	5
23	Lemari Besi	2
24	Filling Kabinet	5
25	Laptop	8
26	Komputer	10
27	Server	1
28	GPS	2
29	Printer	7
30	Telpon	1
31	Mesin Fax	1
32	Kamera	2
33	Penghancur Kertas	2
34	Mesin Tik	3



35	Meja Rapat Bundar	1
36	Kursi Putar Rapat	4
37	Kursi ¹ / ₂ Biro	11
38	Podium	1
39	Genset	2
40	Wireles TOA	1
41	Sound Sistem	1

Sumber : Bappeda maret 2022

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda didukung Sarana operasional kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit. Kondisi ini sudah cukup baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.6

NO	Uraian	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
1	Kepala	1	-
2	Sekretaris	1	3
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	-	2
4	Bidang Fisik	1	1
5	Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	1

Sumber : Bappeda Oktober 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 didominasi oleh dokumen perencanaan. Capaian kinerja pelayanan sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 2.7

Dokumen Perencanaan Bappeda Tahun 2023-2026

NO	DOKUMEN PERENCANAAN	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1	RPJMD	-	-	√	-
2	Perda RTRW	√	-	-	-
3	RENSTRA Bappeda	√	-	-	-
4	RKPD	√	√	√	√
5	RKPD Perubahan	√	√	√	√
6	KUA/KUA Perubahan	√	√	√	√
7	PPAS/PPAS Perubahan	√	√	√	√
8	Rencana aksidaerah Pangan dan Gizi	-	-	-	-
9	Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Lampung Barat	√	√	√	√
10	Rencana Anggaran Tahunan Penanggulangan Kemiskinan	√	√	√	√
11	Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah	√	√	√	√
12	Penyusunan RPJPD 2025-2045 lambar	-	√	-	-

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Lampung Barat
Periode Renstra sebelumnya

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terwujudnya Dokumen-Dokumen Perencanaan Berdasarkan Sistem dan Pola Pembangunan Berjangka yang Semakin Akurat			Persentase Belanja langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrenbang	20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%
				Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Program-Program Pembangunan di Seluruh Sektor, Lintas Sektor, Lintas SKPD dan Lintas Daerah Secara Sinergi, Sistemik dan Terpadu			Pertumbuhan PDRB	1.727.292,32	1.793.726,64	1.860.160,96	1.926.595,28	1.993.029,6	1.682.894	1.194.320	3.887.691	3.887.691	4.088.238	5.642.906,06	59,92%	198,67%	196,67%	212,25
				PDRB Perkapita	1.760.509,48	1.860.160,96	1.956.812,44	2.059.463,92	2.159.115,4	3.934.081	4.857.253	13.387.919	13.387.919	13.948.034	14.519.117,65	109,49%	316,03%	316,03%	329,27
				Laju Inflasi	2,5% - 6%	2,5% - 6%	2,5% - 6%	2,5% - 6%	2,5% - 6%	6,32%	7,31%	-	63,54%	-	3,14	82,08%	0,00%	-	-
				IPM	70,31	70,91	71,5	63,89	64,23	-	70,37	63,54%	-	65,45	97,06%	88,87%	88,87%	101,01	
				Pertumbuhan Ekonomi	5,25 - 5,75	5,5 - 6,00	5,50 - 6,10	5,5 - 6,1	5,5 - 6,2	6,65%	5,16	5,57%	5,57%	5,29	5,01	94,68%	101,27%	101,27%	96,18
				Pendapatan Perkapita	8.320.513	8.660.256	9.000.000	9.339.744	9.679.487	9.181.100	11.515.157	16.022.286	16.022.286	17.490.825	19.083.922,85	118,96%	178,03%	178,03%	187,27
3.	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi.			Persentase Ketelitian Data Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	80%	80%	85%	90%	100%	80%	80%	85%	90%	100%	97,24%	80%	85%	90%	100%



Tabel3.0

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Lampung Barat
Periode Renstra sebelumnya**

Indikator (1)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Terwujudnya Dokumen-Dokumen Perencanaan Berdasarkan Sistem dan Pola Pembangunan Berjangka yang Semakin Akurat	1.474.946.000	832.573.000	1.187.300.000	1.831.738.000	2.381.993.000	1.342.938.000	828.951.000	1.147.397.621	1.763.113.781	2.098.888.866	91,05%	99,56%	96,64%	96,25%	88,11%	20,84%	18,21%
Meningkatnya Program-Program Pembangunan di Seluruh Sektor, Lintas Sektor, Lintas SKPD dan Lintas Daerah Secara Sinergi, Sistemik dan Terpadu	2.288.856.200	1.551.506.200	2.335.328.000	2.243.292.000	234.000.000	2.071.571.494	1.540.045.900	2.243.087.963	2.155.453.000	233.195.396	90,51%	99,26%	96,05%	96,08%	99,66%	-18,80%	-18,27%
Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi.	645.900.000	522.947.500	199.246.000	975.852.500	885.208.000	644.286.000	522.795.500	199.403.000	930.380.130	860.789.958	99,75%	99,97%	100%	95,34%	97,24%	74,89%	69,60%




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang dan penyediaan data statistik sebagai berikut:

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Lampung Barat :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
4. Belum adanya system pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar.
5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan structural dan pelaksana di lingkungan Bappeda;

- 
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
 8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
 9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
 11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

III

ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah


Permasalahan Pokok:

1. *Belum maksimalnya Pencapaian Kinerja pelayanan perencanaan daerah*
2. *Kurangnya sinergitas dan konsistensi dalam menjalankan Program dan Kegiatan*
3. *Lemahnya akses terhadap data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah*
4. *Belum optimalnya sistem pengukuran kinerja dan evaluasi pembangunan*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat, merupakan unsur Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah di bidang perencanaan daerah.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilihat potensi Sumberdaya Manusia di BAPPEDA Tahun 2022, pendidikan ASN BAPPEDA sebanyak 92,85% telah menempuh pendidikan tinggi (Strata 1 dan Strata 2). Berdasarkan golongan terdapat 25% ASN dalam IV dan dan 75% ASN dalam Golongan III, Ini menunjukkan potensi yang besar kepegawaian di BAPPEDA untuk dapat berkembang. Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki BAPPEDA



pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja BAPPEDA cukup memadai namun perlu penyesuaian software dengan teknologi informasi 4.0. Hal ini digunakan untuk menyesuaikan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis.

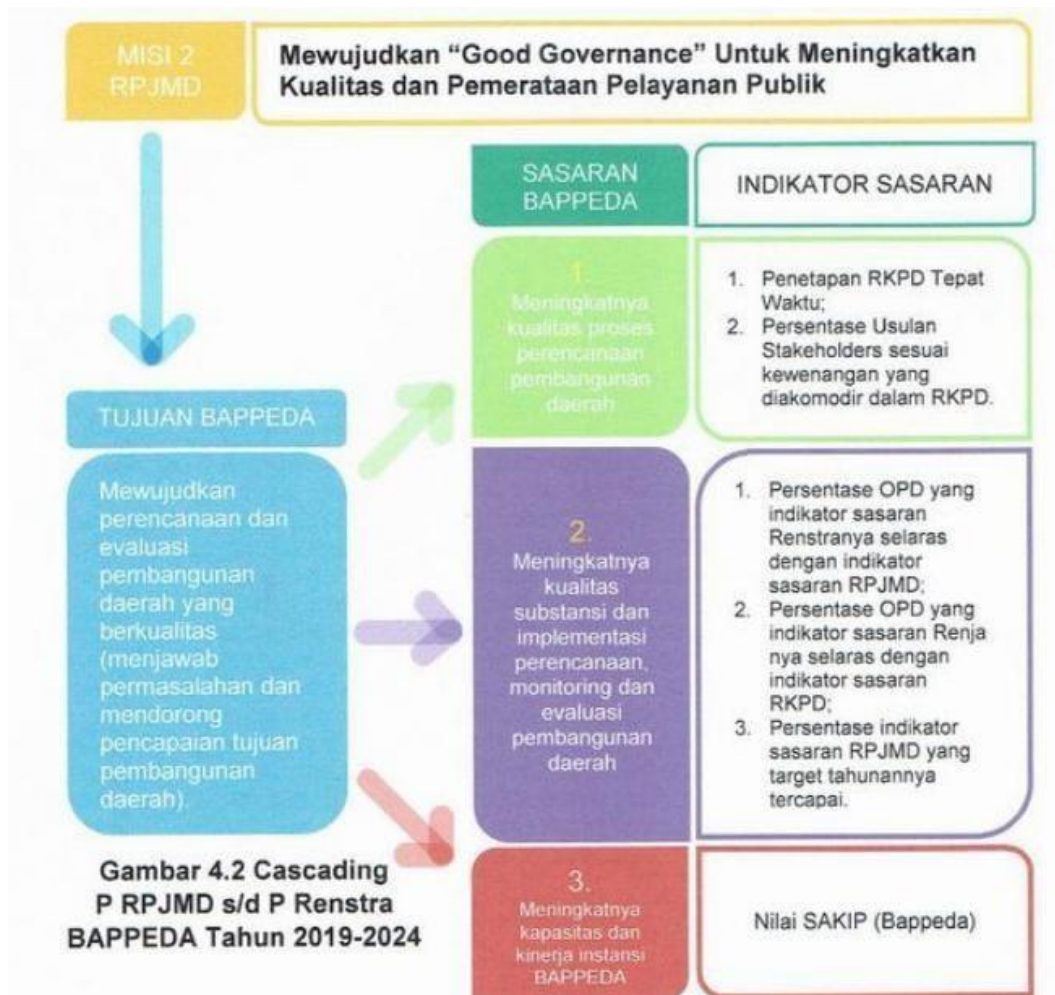
Identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Lampung Barat disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan terkait pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam memberikan Pelayanan Bidang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	(1) Lemahnya pemahaman akan proses perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya sumberdaya aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan. b. Lemahnya kompetensi aparatur bidang perencanaan c. Belum adanya reward and punishment, sebagai motivasi, penerapan disiplin, dan kelancaran tugas
	(2) Belum optimalnya keterlibatan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan rencana di tingkat pekon b. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam upaya pengendalian hasil-hasil perencanaan
Belum Optimalnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	(1) Kurang optimalnya evaluasi dan pengendalian pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang nya kualitas SDM Perencana b. Penetapan indikator kinerja program/ kegiatan yang belum tepat
Belum optimalnya sistem pengukuran kinerja dan evaluasi pembangunan	(1) Lemahnya sistem pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan OPD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya SDM aparatur pelaksana pengukuran
	(2) Masih rendahnya kualitas pelaporan kinerja OPD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih lemahnya koordinasi antar sektor
	(3) Dokumen pelaporan banyak jenisnya dengan substansi yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya penguasaan teknologi dan informasi (IT) b. Peraturan tentang pelaporan berbeda-beda formatnya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi



Gambar 4.2 Cascading P RPJMD s/d P Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024

Analisis Renstra K/L dan OPD renstra Provinsi (yang masih berlaku) bertujuan untuk penjaminan mutu perencanaan pembangunan. Selain itu, dokumen ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Visi Bappenas 2020-2024 adalah :”Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,



Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong ”

Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Lampung Barat Terhadap Sinergitas Pencapaian Sasaran Renstra Bappenas

No	Sasaran Renstra Bappenas RI	Permasalahan Terkait Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Penyelarasan tematik rencana pembangunan antara pusat dan daerah dalam penyiapan RKPD	Perbedaan periodisasi pelaksanaan dokumen perencanaan	Memperkuat hubungan koordinasi antara Bappeda dengan Bappenas
2	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN /Bappenas	Pengawasan dan pengendalian internal	Perbedaan budaya kerja dan lingkup perencanaan	Peluang kerjasama peningkatan kompetensi aparatur melalui pusklat Bappenas

3.3.2. Telaahan Renstra Bappeda Propinsi

Renstra Bappeda Propinsi yang ditelaah, merupakan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun terakhir dari periode RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

Mengacu pada Visi “ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA ” dan 6 (Enam) misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai unsur penunjang pemerintahan urusan perencanaan mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu “ Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik ” dengan sasaran RPJMD yaitu “ Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ”



Dilihat dari 3 sasaran Bappedda Provinsi maka sasaran tersebut merupakan faktor pendorong bagi Bappedda Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.4.1. *Telaahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah*

RTRW Lampung Barat 2010-2030 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 Nomor 1). Tujuan Penataan Ruang Wilayah Lampung Barat adalah mewujudkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang berbasis agro, dan Mitigasi Bencana. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Barat di Propinsi Lampung, maka struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Lampung Barat mengalami penyempurnaan kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka RTRWK Lampung Barat 2010-2030 perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK), dimana berdasarkan hasil PK RTRWK Lampung Barat terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap tujuan penataan ruang, struktur dan pola ruang wilayah, sebagai dampak dari perubahan luas wilayah perencanaan dan pola ruang eksisting yang saat ini menjadi bagian wilayah administrasi Lampung Barat. Identifikasi permasalahan terkait fungsi dan kedudukan Bappeda Lampung Barat sebagai unsure penunjang perencanaan daerah terhadap arah dan kebijakan penataan ruang wilayah secara lengkap disajikan pada **Tabel 3.5**.



Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat berdasarkan Analisa RTRWK

Tujuan RTRWK terkait TUSI OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tindaklanjut hasil peninjauan kembali RTRWK Lampung Barat	Kebijakan satu peta, sebagai salah satu proses untuk mendapatkan persetujuan substansi	Tingkat ketelitian peta digital Pelimpahan urusan penataan ruang kedinas teknis	Memperkuat hubungan koordinatif dan Konsultatif dengan institusi BIG Mengoptimalkan peran TKPRD Kabupaten
Kota Liwa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Belum ditindaklanjuti dengan dokumen RDTR Kota Liwa berikut aspek legal formalnya	Ketidakpastian, peruntukan ruang secara detail guna kepentingan investasi, dan pengendalian.	Masuk dalam RTRW Provinsi Lampung sebagai kawasan andalan Liwa-Krui
Pengembangan Kawasan Strategis Kebun Raya Liwa, Agropolitan Way Tenong, PLTP Sekincau, PLTP Ranau, dan KSPN Danau Ranau	Masih sebatas arahan spasial, belum ditindaklanjuti kedalam aturan yang bersifat teknis dan mengikat semua pihak	Perubahan kewenangan pelaksanaan urusan antara pusat dan propinsi	Memperkuat hubungan kerjasama multipihak




Bappeda sebagai instansi perencana berperan strategis dalam mensinkronkan semua produk perencanaan perangkat daerah dengan RTRW Kabupaten sehingga Rencana Struktur, Rencana Pola Ruang dan Rencana Kawasan Strategis, yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang, yang aman, nyaman produktif, dan berkelanjutan.

1.4.2. *Telaahan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digunakan sebagai bahan telaah adalah KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2017-2022, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, wajib menyusun dokumen KLHS, sebelum dilakukannya penetapan.

Dokumen KLHS merupakan kajian yang sistematis dan komprehensif, guna memberikan penilaian dan merekomendasikan bahwa Kebijakan dan Rencana Program (KRP) yang tertuangdi dalam RPJMD Lampung Barat telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dokumen RPD Lampung Barat tahun 2023-2026, maka ditetapkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Lampung Barat, yaitu:

- 
- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - b. Pengurangan angka Kemiskinan dan Pengangguran
 - c. Peningkatan akses dan jangkauan Pelayanan Masyarakat
 - d. Pemenuhan Insfrastruktur Wilayah
 - e. Kesenjangan Sosial
 - f. Pelestarian Sosial Budaya, dan
 - g. Kualitas Lingkungan

Kajian KLHS terhadap pelaksanaan program yang menjadi kewenangan Bappeda Lampung Barat, disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat berdasarkan Analisis KLHS RPJMD

Analisis KLHS	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Keterpaduan data (data eksisting sulit didapatkan secara akurat)	Ketersediaan data ditingkat OPD, khususnya data series	Kerjasama penyediaan basis data yang akurat
Menentukan target pencapaian perencanaan untuk skala daerah, khususnya bila bicara multiplier effect	Orientasi masih pada ketercapaian output (hasil) belum pada ketercapaian outcome (manfaat)	Penerapan system akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Perencanaan pembangunan belum diukur dari faktor atau kondisi eksisting sumberdaya yang ada (belum komprehensif)	Evaluasi masih pada tahap penyerapan anggaran, belum pada kebermanfaatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam evaluasi pembangunan secara partisipatif
Konsekuensi dari penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdampak tidak sinkronnya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan	Urutan waktu yang tidak sama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah	Memperkuat hubungan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kegiatan prioritas

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan metode dan indikator penetapan isu-isu strategis, maka isu-isu strategis yang diangkat Bappeda Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM Perencana untuk mewujudkan kualitas para perencana teknokratik dan memantapkan kelembagaan Bappeda selaku institusi perencana.
- b. Melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- c. Keinginan untuk mewujudkan tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran, untuk menjaga konsistensi sistem perencanaan pembangunan daerah.
- d. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di semua sektor (kewilayahan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan data dan informasi).
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terimplementasi sesuai dengan rencana peruntukannya.
- f. Mendorong meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kebutuhan akan ruang yang lebih manusiawi.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan

tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas.

Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Keselarasan Kinerja Utama Bappeda dengan RPD Lampung Barat 2023-2026

Tujuan : *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan*

Indikator Tujuan:

1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP
2. Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP

Sasaran: *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan*

Indikator Sasaran :

1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP
2. Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP

a. Tujuan Renstra

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maka yang menjadi tujuan BAPPEDA untuk kurun waktu 2023-2026 adalah: **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan”**, dengan indikator

1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP
2. Nilai Komponen Pengukuran kinerja pada SAKIP

b. Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

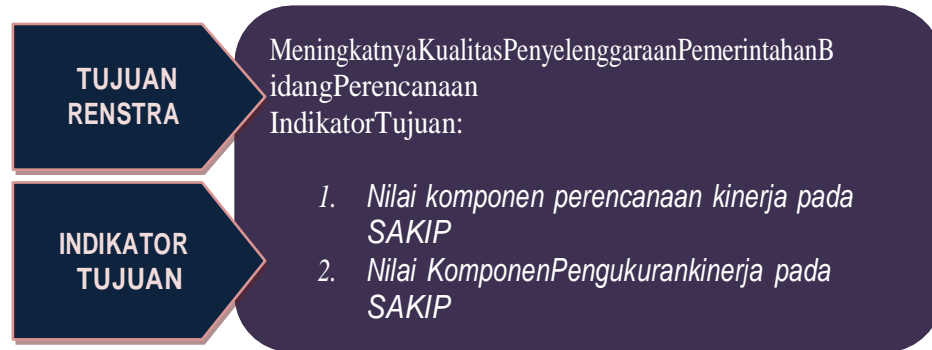
Penggambaran dari tercapainya tujuan Bappeda Lampung Barat, diukur dari terpenuhinya kondisi yang menjadi sasaran strategisnya, yaitu:

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, dengan indikator sasaran :

1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP
2. Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan Indikator sasaran Renstra Bappeda Lampung Barat 2023-2026 dan pencapaian target sasaran Renstra Bappeda hingga tahun 2023 disajikan pada Gambar 4.1. dan Tabel 4.1.

RENSTRA BAPPEDA 2023-2026



Sasaran dan indikator Strategis Bappeda



Tabel 4.1

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARANDAN TARGET KINERJA BAPPEDA LAMPUNG BARAT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan	1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP 2. Nilai Komponen Pengukuran kinerja pada SAKIP	1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Pembangunan	1.1.1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	22,87	23,25	23,63	24,01
				1.1.2. Nilai Komponen Pengukuran kinerja pada SAKIP	17,63	18,43	19,22	20,02

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama. Dalam IKU Pemerintah Daerah tersebut memuat 6 tujuan dengan 31 Sasaran, dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 52 Indikator Sasaran.

Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (IKU OPD) merupakan penjabaran lebih lanjut dari IKU Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKU OPD selanjutnya menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD dan Jajarannya sebagai komitmen OPD dalam mencapai target sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA memuat 1 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda sebagaimana terlampir didalam dokumen RENSTRA BAPPEDA Tahun 2023-2026.

Tabel 4.2

DIFINISI OPERASIONAL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA LAMPUNG BARAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB												
ESELON II																
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP</p> <p>2. Nilai Komponen Pengukuran kinerja pada SAKIP</p>	<p>Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p> <p>1.1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB:.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen yang dinilai</th> <th>Bobot</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> <td>22,87</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> <td>17,63</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen yang dinilai	Bobot	2023	1	Perencanaan Kinerja	30	22,87	2	Pengukuran Kinerja	30	17,63	Kepala Badan
No	Komponen yang dinilai	Bobot	2023													
1	Perencanaan Kinerja	30	22,87													
2	Pengukuran Kinerja	30	17,63													
ESELON III																

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB
4	1. Meningkatnya pelayanan perkantoran secara tertib, lancar dan akuntabel 2. Tersedianya Sarana Prasarana memadai yang mendukung kinerja aparatur 3. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur 4. Meningkatnya kualitas dan kinerja pelaporan	4.1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 4.2. Persentase Sarana dan Prasarana yang memadai 4.3. Persentase aparatur yang mengikuti diklat 4.4. Persentase dokumen keuangan dan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	4.1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu diukur dengan rumus sebagai berikut : $\frac{\text{Pelayanan administrasi yang tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi}} \times 100\% = 100\%$ 4.2 Persentase Sarana dan Prasarana yang memadai diukur dengan rumus sebagai berikut : $\frac{\text{Sarana dan Prasarana yang memadai}}{\text{Seluruh sarana dan prasarana}} \times 100\% = 100\%$ 4.3 Persentase aparatur yang mengikuti diklat diukur dengan rumus sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat}}{\text{Seluruh ASN}} \times 100\% = 15\%$ 4.4 Persentase dokumen keuangan dan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu diukur dengan rumus sebagai berikut : $\frac{\text{Dokumen yang tersusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen yang disusun}} \times 100\% > 100\%$	Sekretaris Badan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbangkec yang dapat diakomodir dalam APBD Kabupaten	<p>Penjaringan aspirasi dimulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat propinsi dan pusat, melalui suatu rangkaian penjaringan aspirasi masyarakat yang didanai melalui APBD Kabupaten, dilaksanakan sesuai tahapan dan waktu yang telah ditentukan, dan disusun kedalam sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi (e-planning dan e-budgeting) berbasis IT.</p> <p>Persentase aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir dihitung dengan formulasi:</p> $\frac{\sum Usulan\ ke\ musrenkec.\ yg\ terakomodir\ dlm\ APBD}{\sum Total\ usulan\ kegiatan\ musrenkec.} \times 100\%$ $\geq 10\%$ <p>Semakin besar nilai persentasenya, maka dianggap bahwa semakin sinkronnya kegiatan APBD terhadap prioritas pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat.</p>	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Kabid PEP)
6	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan	Persentase hasil rekomendasi evaluasi rencana pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	<p>Dimaksudkan adalah untuk tercapainya keselerasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban OPD atas kinerja yang dilakukan sesuai perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Upaya Pengendalian dan Evaluasi pembangunan meliputi agenda LPJ, LKPI, Reses Dewan, Audit BPK, Evaluasi Gubernur terhadap ranperda APBD. Adapun prestasi yang hendak diraih oleh Bappeda Lampung Barat adalah mempertahankan dan atau meningkatkan prestasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah melalui anugerah PPD baik di tingkat Propinsi maupun Nasional. Untuk mengukur hal tersebut dilakukan dengan formulasi:</p> $\frac{\sum Rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum Total\ Rekomendasi\ yang\ diberikan} \times 100\% ; = 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Kabid PEP)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB
7	Terkelolanya data dan informasi pembangunan daerah	Persentase data pembangunan daerah yang terbaharui	<p>Dalam menyusun dokumen perencanaan dibutuhkan data pembangunan yang terbaharui untuk mendesain/merancang program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh daerah dalam mencapai tujuan pembangunannya baik secara jangka panjang maupun jangka menengah, rumus untuk menghitung dilakukan pendekatan sebagai berikut:</p> $\frac{\sum \text{Data yang diperbaharui}}{\sum \text{Data pembangunan yang tersedia}} \times 100\% ; = 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Kabid PEP)
		Persentase informasi pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan RKPD	<p>Salah satu persyaratan dalam penyusunan dan evaluasi dokumen RKPD dibutuhkan informasi terkait dengan pembangunan daerah baik menyangkut informasi dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat maupun informasi menyangkut kewilayahan (areal terbangun), infrastruktur dan sarana prasarana yang sudah terbangun, rumus untuk menghitung dilakukan pendekatan sebagai berikut:</p> $\frac{\sum \text{Informasi pemb. daerah yg mendukung RKPD}}{\sum \text{Informasi pembangunan daerah yang tersedia}} \times 100\% ; = 100\%$	Kabid Ekonomi dan Kesra/ Kabid Fisik
8	Meningkatnya Kualitas/Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keselarasan Perencanaan dokumen perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan RPJMD	<p>Dimaksudkan untuk menghitung keselarasan indikator kinerja dokumen perencanaan seluruh OPD bidang kesra dan ekonomi terhadap indikator kinerja yang terakomodir dalam RPJMD.</p> $\frac{\sum \text{Indikator kinerja prog. pada dok. perencanaan Bid. Kesra}}{\sum \text{Total Indikator kinerja program bid. Kesra di RPD}} \times 100\%$ <p>dan</p> $\frac{\sum \text{Indikator kinerja prog. pada dok. perenc. bid. ekonomi}}{\sum \text{Total Indikator kinerja program bid. ekonomi di RPD}} \times 100\%$	Kabid Ekonomi dan Kesra



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase hasil rekomendasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dapat ditindaklanjuti.	Semakin tinggi nilai persentase, maka akan semakin selaras. Dampak dari adanya pembangunan adalah semakin membaiknya kondisi perekonomian wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketercapaian program perencanaan bidang perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dapat diukur dari hasil rekomendasi bidang ekokesra di tindaklanjuti baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, melalui pendekatan sebagai berikut: $\frac{\sum \text{Rekomendasi bid. ekokesra yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{Total Rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$	Kabid Ekonomi dan Kesra
9	Meningkatnya kualitas/keselarasan perencanaan pembangunan Daerah Lingkup Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana Wilayah & SDA	Kualitas/keselarasan perencanaan pembangunan daerah lingkup sarana/prasarana wilayah dan SDA diukur dengan membandingkan indikator program dalam lingkup lingkup sarana/prasarana wilayah dan SDA dengan indikator program dalam RPJMD lingkup bidang lingkup sarana/prasarana wilayah dan SDA, diukur dengan formulasi : $\frac{\sum \text{Indikator Program dlm RKPD lingkup praswil \& SDA}}{\sum \text{Indikator program praswil \& SDA dalam RPD}} \times 100\%$	Kabid Fisik
			Capaian proporsi penjabaran program/kegiatan RKPD yang konsisten ke dalam Renja Perangkat Daerah lingkup bidang sarana/prasarana wilayah dan SDA, diukur dengan formulasi : $\frac{\sum \text{Program/Kegiatan dalam Renja lingkup Sarpraswil \& SDA}}{\sum \text{Program/Kegiatan dalam RKPD lingkup Sarpraswil \& SDA}} \times 100$	Kabid Fisik



V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi BAPPEDA Lampung Barat

Guna tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, diperlukan upaya-upaya atau langkah-langkah kerja yang bersifat strategis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal guna mengantisipasi resiko gagalnya fungsi dan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan pemenuhan target sasaran dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap tahunnya.


Strategi Bappeda Lampung Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya dirumuskan, sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan , dilakukan melalui strategi:

- 1.Meningkatkan Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP
- 2.Meningkatkan Nilai Komponen Pengukuran kinerja pada SAKIP

5.2. Arah Kebijakan BAPPEDA Lampung Barat

Arah kebijakan merupakan logical framework yang memberikan panduan dari langkah strategis yang telah dirumuskan agar target kinerja dari tiap sasaran yang menjadi indikator kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi sesuai yang diharapkan. Rumusan Arah Kebijakan



Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Lampung Barat 2023-2026, sebagai berikut:

1.1.1. Arah Kebijakan dari sasaran Strategi:

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan dan Evaluasi Pembangunan daerah arah kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Evaluasi dokumen Sesuai aturan yang berlaku.
2. Menjalankan Koordinasi secara Berkala dan Periodik.

Guna mencapai target sasaran dari Rencana Strategisnya, Bappeda Lampung Barat merumuskan satu upaya strategi dengan 2 arah kebijakan, serta didukung kedalam 2 (Dua) Program Strategis. Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan serta Program disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA LAMPUNG BARAT

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP 2. Meningkatkan Nilai Komponen Pengukuran kinerja pada SAKIP	1.1.2. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dokumen sesuai aturan yang berlaku 1.1.3. Menjalankan Koordinasi secara Berkala dan Periodik 2.1.1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 2.1.2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah



VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran strategis secara lengkap disajikan pada Tabel 6.1. dan tertuang dalam lampiran Renstra dalam bentuk CASCADING.

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, BAPPEDA LAMPUNG BARAT 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan				Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	22,01 Poin 15,96 Poin	22,57 Poin 17,61 Poin	22,76 Poin 18,20 Poin	22,95 Poin 18,80 Poin	23,14 Poin 19,43 Poin	0 Poin 0 Poin	23,14 Poin 19,43 Poin								
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan			Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	22,01 Poin 15,96 Poin	22,57 Poin 17,61 Poin	22,76 Poin 18,20 Poin	22,95 Poin 18,80 Poin	23,14 Poin 19,43 Poin	0 Poin 0 Poin	23,14 Poin 19,43 Poin								
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	0 %	70,00 %	2.358.291.570	80,00 %	2.233.856.827	90,00 %	2.686.742.510	100 %	2.476.416.761	0 %	0	100 %	0		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita acara	1 Berita acara	1.247.142.570	1 Berita acara	1.383.856.827	3 Berita acara	1.546.742.510	1 Berita acara	1.531.416.761	0 Berita acara	0	6 Berita acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Peranglat Daerah/Lintas Peranglat Daerah	0 Berita Acara	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	4 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	4 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (R/PPD/RP/MD/RKPD)	0 Dokumen	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	6 Dokumen	0	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	20 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0 Orang	50 Orang	180.000.000	50 Orang	190.000.000	50 Orang	205.000.000	50 Orang	225.000.000	0 Orang	0	200 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0 Buku	1 Buku	0	1 Buku	0	1 Buku	0	1 Buku	0	0 Buku	0	4 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	3 Laporan	931.149.000	3 Laporan	660.000.000	3 Laporan	995.000.000	3 Laporan	720.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	0 Laporan	6 Laporan	0	4 Laporan	0	6 Laporan	0	4 Laporan	0	0 Laporan	0	20 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RRI/MD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator kinerja Program RRI/MD Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	0 % 0 %	85 % 85 %	2.444.844.300 20.720.800.000	90 % 90 %	23.471.370 2.279.288.000	95 % 95 %	2.973.807.302 2.507.216.800	100.00 % 100 %	3.271.188 2.757.938.480	0 % 0 %	0 0	100.00 % 100 %	0 0	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penusunannya (RRI/MD, RRI/MD dan RRI/MD)	0 dokumen	3 dokumen	515.641.000	3 dokumen	570.635.850	3 dokumen	627.699.435	3 dokumen	690.459.379	0 dokumen	0	12 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	0 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	0	6 Perangkat Daerah	0	6 Perangkat Daerah	0	6 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	24 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	0 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	0	6 Perangkat Daerah	0	6 Perangkat Daerah	0	6 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	24 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRI/MD pada Bidang Perencanaan	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penusunannya (RRI/MD, RRI/MD dan RRI/MD)	0 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	24 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	64 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RJPD, RPJMD dan RKPD)	0 dokumen	1 dokumen	619.522.520	1 dokumen	681.474.750	1 dokumen	824.224.448	1 dokumen	2.874.843.923	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0 dokumen	4 dokumen	0	4 dokumen	0	4 dokumen	0	4 dokumen	0	0 dokumen	0	16 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	16 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RJPD, RPJMD dan RKPD)	0 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	16 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	16 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXIX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	0 %	82,79 %	3.638.246.754	83,04 %	4.002.071.429	83,29 %	4.381.068.413	83,54 %	4.820.055.254	0 %	0	83,54 %	0	
		XXIX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	11 Dokumen	111.394.740	8 Dokumen	122.534.214	11 Dokumen	134.787.635	8 Dokumen	148.266.309	0 Dokumen	0	38 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





		XXX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	0 dokumen	5 dokumen	0	5 dokumen	0	5 dokumen	0	5 dokumen	0	0 dokumen	0	20 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen	0	12 dokumen	0	12 dokumen	0	0 dokumen	0	48 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	2.716.796.500	26 Orang/Bulan	2.988.476.150	26 Orang/Bulan	3.287.323.765	26 Orang/Bulan	3.616.056.142	0 Orang/Bulan	0	104 Orang/Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	104 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	0 Laporan	0	8 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 dokumen	1 dokumen	4.706.900	1 dokumen	5.177.590	1 dokumen	5.695.349	1 dokumen	6.264.884	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen	1 dokumen	14.537.400	1 dokumen	16.013.140	1 dokumen	17.614.454	1 dokumen	19.375.899	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	4 Orang	0	4 Orang	0	4 Orang	0	4 Orang	0	0 Orang	0	16 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3 Paket	290.504.834	3 Paket	319.555.317	3 Paket	351.510.849	3 Paket	386.661.934	0 Paket	0	12 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengerjaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Jumlah Dokumen Bahan													Badan	





		XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	0 Unit	1 Unit	67.397.550	1 Unit	74.137.305	1 Unit	81.551.036	1 Unit	89.706.140	0 Unit	0	4 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan	205.316.430	1 Laporan	225.848.073	1 Laporan	248.432.880	1 Laporan	273.276.168	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		XXX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0 Unit	11 Unit	227.572.400	11 Unit	250.329.640	11 Unit	254.952.445	11 Unit	280.447.690	0 Unit	0	44 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





VII **KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Dalam menetapkan indikator kinerja Bappeda Lampung
Barat mengacu kepada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, sebagai berikut :



Tabel7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Sasaran RPD

NO	INDIKATO RSASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<p>Nilai KomponenPerencanaanKinerja pada SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - DokumenPerencanaankinerjatelahtersedia - Dokumenperencanaankinerjatelahmemenuhistanar yang baik, yaituuntukmencapaihasildenganukurankinerja yang Smart, menggunakanpenyelarasan(cascading) disetiap level secaralogis, sertamemperhatikankinerjabidang lain (crosscutting) - Perencanaankinerjatelahdimanfaatkanuntukhasil yang berkesinambungan 	100%	100%	22,87%	23,25%	23,63%	24,01%	100%
		100%	100%	22,87%	23,25%	23,63%	24,01%	100%

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		100%	100%	22,87%	23,25%	23,63%	24,01%	100%
2.	<p>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran Kinerja Telah dilakukan - pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan - Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 	60%	60%	17,63%	18,43%	19,22%	20,02%	100%
		60%	60%	17,63%	18,43%	19,22%	20,02%	100%

VIII

PENUTUP

RencanaStrategishasil penyelarasan ini adalah dokumen perencanaan urusan penunjuang bidang perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan dalam kerangka mewujudkan Tujuan Kabupaten Lampung Barat yang dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.


Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Lampung Barat.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Bappeda ini akan menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja BAPPEDA. Karena itu renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RKA BAPPEDA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BAPPEDA merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan perencanaan pembangunan dan atau target kinerja sasaran BAPPEDA.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra BAPPEDA yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA BAPPEDA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja BAPPEDA dimasa yang akan datang.

Akhir komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja RENSTRA BAPPEDA.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AGUSTANTO BASMAR, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690302 199803 1 007



LAMPIRAN





LAMPIRAN



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	312 Orang/bulan	22,57 poin	2,464,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	2,464,315,000
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Laporan	22,57 poin	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	1,000,000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	2 Laporan	22,57 poin	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	2,000,000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Dokumen	22,57 poin	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	2,500,000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,706,900				5,177,590		
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Dokumen	100 %	4,706,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	5,177,590
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							14,557,400				16,013,140		
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Dokumen	100 %	3,557,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	3,913,140
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	2 Orang	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	12,100,000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							290,504,834				319,455,317		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Paket	100 %	4,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	4,537,500
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Paket	100 %	15,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	16,915,800
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Paket	100 %	52,348,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	57,583,658
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Pasar Liwa	82,79 %	1 Dokumen	100 %	12,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	13,503,600
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Laporan	100 %	16,080,354	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	17,688,389
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Laporan	100 %	190,296,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	209,226,370
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67,397,550				74,137,305	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Unit	100 %	67,397,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	74,137,305
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							180,665,430				198,731,973	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Laporan	22.57 poin	6,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	6,642,900

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Laporan	22.57 poin	6,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	6,642,900
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Laporan	22.57 poin	168,587,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	185,446,173
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							227,572,400			250,329,640			
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	11 Unit	100 %	185,546,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	204,101,590
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	82,79 %	1 Unit	100 %	32,571,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	35,828,100
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	82,79 %	1 Unit	100 %	9,454,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	10,399,950
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							2,358,291,570			2,233,856,827			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							1,247,142,570			1,383,856,827			
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	70,00 %	1 Berita Acara	22.57 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	55,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	70,00 %	0 Berita Acara	22.57 Poin	147,204,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	161,925,225

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	70,00 %	1 Berita Acara	22.57 Poin	469,937,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	516,931,602
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	70,00 %	5 Dokumen	22.57 Poin	580,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	650,000,000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							180,000,000				190,000,000		
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	70,00 %	50 Orang	22.57 Persen	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	90,000,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	70,00 %	1 Buku	22.57 Persen	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	100,000,000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							931,149,000				660,000,000		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,00 %	3 Laporan	22.57 Persen	221,149,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	230,000,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	70,00 %	6 Laporan	22.57 Persen	710,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	430,000,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							2,409,846,000				2,657,957,800		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							945,363,500				1,039,959,850		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	2 Dokumen	100 %	150,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	165,555,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	10 Perangkat Daerah	100 %	14,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	15,882,400
5	01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Laporan	100 %	37,721,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	41,493,100
5	01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kajian IPM Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan ketercapaian TPM	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	1 dokumen 0 Laporan 1 Laporan 30 Ekseplar	100 %	451,509,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	496,660,450
5	01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	2 Dokumen	100 %	65,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	72,528,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	0 Laporan 4 Perangkat Daerah	100 %	8,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	9,516,100
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	0 Laporan 4 Perangkat Daerah	100 %	51,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	56,834,800
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	1 Laporan	100 %	164,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	181,489,000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							844,960,000					936,523,200	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	2 Dokumen	22.57 point	141,344,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	162,545,600

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	6 Perangkat Daerah	22.57 point	19,906,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	21,896,600
5	01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	0 Laporan 6 Perangkat Daerah	22.57 point	58,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	64,719,600
5	01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	1 Laporan	22.57 point	383,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	421,440,800
5	01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	1 Dokumen	22.57 point	95,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	105,088,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	4 Perangkat Daerah	22.57 point	14,978,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	16,475,800
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	4 Perangkat Daerah	22.57 point	25,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	27,722,200
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 % 85 %	1 Laporan	22.57 point	106,031,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	116,634,100
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							619,522,500						681,474,750
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 %	1 Dokumen	100 %	134,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	148,262,400
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 %	4 Perangkat Daerah	100 %	12,203,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	13,423,300
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 %	4 Perangkat Daerah	100 %	16,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	17,803,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 %	1 Laporan	100 %	134,626,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	148,088,600
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 %	1 Dokumen	100 %	134,960,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	148,456,550
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 %	4 Perangkat Daerah	100 %	11,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	12,699,500
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Perangkat Daerah	100 %	36,701,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	40,371,100
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	85 %	1 Laporan	100 %	138,518,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	152,369,800
TOTAL												8,134,545,824		8,347,576,206				

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian Renstra Periode	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	1 bidang urusan	1 bidang urusan	82,79 Persentase	3.638.246.754	83,04 Persentase	4.002.071.429	83,29 Persentase	4.381.868.413	83,54 Persentase	4.820.055.254	1 Persentase	16.842.241.851	Bappeda			
		X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			28 dokumen	111394740	25 dokumen	122534214	28 dokumen	134787635	25 dokumen	148266399	106 dokumen	516.982.988	Bappeda			
		X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11 dokumen	70.671.040	8 dokumen	77.738.144	11 dokumen	85.511.958	8 dokumen	94.063.154	38 dokumen	327.984.296	Bappeda			
		X XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1.915.100	1 dokumen	2.106.610	1 dokumen	2.317.271	1 dokumen	2.548.998	4 dokumen	8.887.979	Bappeda			
		X XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	2.019.600	1 dokumen	2.221.560	1 dokumen	2.443.716	1 dokumen	2.688.088	4 dokumen	9.372.964	Bappeda			
		X XX 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dokumen	2.381.000	1 dokumen	2.619.100	1 dokumen	2.881.010	1 dokumen	3.169.111	4 dokumen	11.050.221	Bappeda			
		X XX 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 dokumen	2.679.600	1 dokumen	2.947.560	1 dokumen	3.242.316	1 dokumen	3.566.548	4 dokumen	12.436.024	Bappeda			
		X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	2.266.000	1 Laporan	2.492.600	1 Laporan	2.741.860	1 Laporan	3.016.046	4 Laporan	10.516.506	Bappeda			
		X XX 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	29.462.400	12 Laporan	32.408.640	12 Laporan	35.649.504	12 Laporan	39.214.454	48 Laporan	136.734.998	Bappeda			
		X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun			4 dokumen	2.716.796.500	0 dokumen	2.988.476.150	0 dokumen	3.287.323.765	0 dokumen	3.616.056.142	4 dokumen	12.608.652.557	Bappeda			
		X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			312 orang/bulan	2.710.746.500	312 orang/bulan	2.981.821.150	312 orang/bulan	3.280.003.265	312 orang/bulan	3.608.003.592	orang/bulan	12.580.574.507	Bappeda			
		X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	-	Bappeda			
		X XX 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	-	Bappeda			
		X XX 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	-	Bappeda			
		X XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	1.210.000	1 Laporan	1.331.000	1 Laporan	1.464.100	4 Laporan	5.105.100	Bappeda			

		X XX 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	Bappeda		
		X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	8 laporan	10.210.200	Bappeda	
		X XX 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	12.762.750	Bappeda	
		X XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	21.844.723	Bappeda	
		X XX 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	21.844.723	Bappeda	
		X XX 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	Bappeda	
		X XX 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	-	Bappeda	
		X XX 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	-	Bappeda	
		X XX 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	-	Bappeda	
		X XX 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	-	Bappeda	
		X XX 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	Bappeda	
		X XX 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	Bappeda	
		X XX 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0 dokumen	-	Bappeda	
		X XX 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0 dokumen	-	Bappeda	
		X XX 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			0,00 laporan	0,00 laporan	0,00 laporan	0,00 laporan	0,00 laporan	0,00 laporan	0,00 laporan	0 laporan	-	Bappeda	
		X XX 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah			0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00 dokumen	0 dokumen	-	Bappeda	
		X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	67.560.893	Bappeda	
		X XX 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0,00 unit	0,00 unit	0,00 unit	0,00 unit	0,00 unit	0,00 unit	0,00 unit	0 unit	-	Bappeda	

		X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0 paket		-	Bappeda	
		X XX 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1,00 dokumen	3.557.400	1,00 dokumen	3.913.140	1,00 dokumen	4.304.454	1,00 dokumen	4.734.899	4 dokumen	16.509.893		Bappeda	
		X XX 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0 dokumen		-	Bappeda	
		X XX 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0 dokumen		-	Bappeda	
		X XX 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0 orang		-	Bappeda	
		X XX 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			0,00 laporan		0,00 laporan		0,00 laporan		0,00 laporan		0 laporan		-	Bappeda	
		X XX 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugas			0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0 orang		-	Bappeda	
		X XX 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4,00 orang	11.000.000	4,00 orang	12.100.000	4,00 orang	13.310.000	4,00 orang	14.641.000	16 orang	51.051.000		Bappeda	
		X XX 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0 orang		-	Bappeda	
		X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0 orang		-	Bappeda	
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum			3 paket	290.504.834	3 paket	319.555.317	3 paket	351.510.849	3 paket	386.661.934	12 paket	1.348.232.934		Bappeda	
		X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,00 paket	4.125.000	1,00 paket	4.537.500	1,00 paket	4.991.250	1,00 paket	5.490.375	4 paket	19.144.125		Bappeda	
		X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0 paket		-	Bappeda	
		X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0 paket		-	Bappeda	
		X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,00 paket	15.378.000	1,00 paket	16.915.800	1,00 paket	18.607.380	1,00 paket	20.468.118	4 paket	71.369.298		Bappeda	
		X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1,00 paket	52.348.780	1,00 paket	57.583.658	1,00 paket	63.342.024	1,00 paket	69.676.226	4 paket	242.950.688		Bappeda	
		X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1,00 dokumen	12.276.000	1,00 dokumen	13.503.600	1,00 dokumen	14.853.960	1,00 dokumen	16.339.356	4 dokumen	56.972.916		Bappeda	
		X XX 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0,00 paket		0 paket		-	Bappeda	
		X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1,00 Laporan	16.080.354	1,00 Laporan	17.688.389	1,00 Laporan	19.457.228	1,00 Laporan	21.402.951	4 Laporan	74.628.923		Bappeda	
		X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,00 Laporan	190.296.700	1,00 Laporan	209.326.370	1,00 Laporan	230.259.007	1,00 Laporan	253.284.908	4 Laporan	883.166.985		Bappeda	
		X XX 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0 dokumen		-	Bappeda	
		X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0,00 dokumen		0 dokumen		-	Bappeda	
		X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan			1 unit	67.397.550	1 unit	74.137.305	1 unit	81.551.036	1 unit	89.706.140	4 unit	312.792.030		Bappeda	

		X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1,00 Unit	67.397.550	1,00 Unit	74.137.305	1,00 Unit	81.551.036	1,00 Unit	89.706.140	4 Unit	312.792.030	Bappeda
		X XX 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0,00 Unit		0,00 Unit		0,00 Unit		0 Unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0 sub organisasi	205.316.430	0 sub organisasi	225.848.073	0 sub organisasi	248.432.880	0 sub organisasi	273.276.168	0 sub organisasi	952.873.551	Bappeda
		X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,00 laporan	6.039.000	1,00 laporan	6.642.900	1,00 laporan	7.307.190	1,00 laporan	8.037.909	4 laporan	28.026.999	Bappeda
		X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1,00 laporan	30.690.000	1,00 laporan	33.759.000	1,00 laporan	37.134.900	1,00 laporan	40.848.390	4 laporan	142.432.290	Bappeda
		X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0,00 laporan		0,00 laporan		0,00 laporan		0,00 laporan		0 laporan	-	Bappeda
		X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1,00 laporan	168.587.430	1,00 laporan	185.446.173	1,00 laporan	203.990.790	1,00 laporan	224.389.869	4 laporan	782.414.262	Bappeda
		X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			13 unit	227.572.400	13 unit	250.329.640	13 unit	254.952.445	13 unit	280.447.690	52 unit	1.013.302.175	Bappeda
		X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda		
		X XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11,00 unit	185.546.900	11,00 unit	204.101.590	11,00 unit	204.101.590	11,00 unit	224.511.749	44 unit	818.261.829	Bappeda
		X XX 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda		

		X XX 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda			
		X XX 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda			
		X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1,00 unit	32.571.000	1,00 unit	35.828.100	1,00 unit	39.410.910	1,00 unit	43.352.001	4 unit	151.162.011	Bappeda	
		X XX 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda			
		X XX 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda			
		X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0 unit	-	Bappeda			
		X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1,00 unit		1,00 unit		1,00 unit		1,00 unit		4 unit	-	Bappeda	
		X XX 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,00 unit	9.454.500	0,00 unit	10.399.950	0,00 unit	11.439.945	0,00 unit	12.583.940	0 unit	43.878.335	Bappeda	
		X XX 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0 Ha	-	Bappeda			
		5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja			1 Persentase	2.358.291.570	1 Persentase	2.233.856.827	1 Persentase	2.686.742.510	1 Persentase	2.476.416.761	Persentase	9.755.307.668	Bappeda	
		5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan			5 dokumen	1.247.142.570	5 dokumen	1.383.856.827	6 dokumen	1.546.742.510	4 dokumen	1.531.416.761	20 dokumen	5.709.158.668	Bappeda	
		5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0 Dokumen	-	Bappeda	
		5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0 Dokumen	-	Bappeda	
		5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita acara	1 Berita acara	50.000.000	1 Berita acara	55.000.000	3 Berita acara	100.000.000	1 Berita acara	110.000.000	6 Berita acara	315.000.000	Bappeda	
		5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			1,00 Berita acara	147.204.750	1,00 Berita acara	161.925.225	1,00 Berita acara	178.117.748	1,00 Berita acara	195.929.523	4 Berita acara	683.177.245	Bappeda	
		5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1,00 Berita acara	469.937.820	1,00 Berita acara	516.931.602	1,00 Berita acara	568.624.762	1,00 Berita acara	625.487.238	4 Berita acara	2.180.981.422	Bappeda	
		5 01 02 2.01 06	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			0,00 Usulan		0,00 Usulan		0,00 Usulan		0,00 Usulan		0 Usulan	-	Bappeda	
		5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			5 Dokumen	580.000.000	5 Dokumen	650.000.000	6 Dokumen	700.000.000	4 Dokumen	600.000.000	20 Dokumen	2.530.000.000	Bappeda	
		5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen analisis data ... yang disusun			0 0	180.000.000	0 0	190.000.000	0 0	205.000.000	0 0	225.000.000	0 0	800.000.000	Bappeda	

		5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			0,00 Masukan		0,00 Masukan		0,00 Masukan		0 Masukan	-	Bappeda			
		5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			50,00 Orang	85.000.000	50,00 Orang	90.000.000	50,00 Orang	100.000.000	50,00 Orang	110.000.000	200 Orang	385.000.000	Bappeda	
		5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			100,00 Buku	95.000.000	100,00 Buku	100.000.000	100,00 Buku	105.000.000	100,00 Buku	115.000.000	400 Buku	415.000.000	Bappeda	
		5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		0		0 0	931.149.000	0 0	660.000.000	0 0	935.000.000	0 0	720.000.000	0 0	3.246.149.000	Bappeda	
		5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			3,00 Laporan	221.149.000	3,00 Laporan	230.000.000	3,00 Laporan	235.000.000	3,00 Laporan	240.000.000	12 Laporan	926.149.000	Bappeda	
		5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya			0,00 Kerjasama		0,00 Kerjasama		0,00 Kerjasama		0,00 Kerjasama		0 Kerjasama	-	Bappeda	
		5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			4,00 Laporan	710.000.000	4,00 Laporan	430.000.000	6,00 Laporan	700.000.000	4,00 Laporan	480.000.000	18 Laporan	2.320.000.000	Bappeda	
		5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		0		0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	-	Bappeda	
		5 01 02 2.04 01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0 Dokumen	-	Bappeda	
		5 01 02 2.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0 Dokumen	-	Bappeda	
		5 01 02 2.04 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0 Dokumen	-	Bappeda	
		5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Bidang Perencanaan Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA			1 Persentase	1.458.635.150	1 Persentase	1.607.933.535	1 Persentase	1.768.721.286	1 Persentase	1.945.593.485	Persentase	6.780.883.456	Bappeda	
		5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		0		0 0	565.532.000	0 0	622.085.200	0 0	684.293.720	0 0	752.723.092	0 0	2.624.634.012	Bappeda	
		5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			3,00 Dokumen	70.590.000	3,00 Dokumen	77.649.000	3,00 Dokumen	85.413.900	3,00 Dokumen	93.955.290	12 Dokumen	327.608.190	Bappeda	
		5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			10,00 perangkat Daerah	7.979.000	10,00 perangkat Daerah	8.776.900	10,00 perangkat Daerah	9.654.590	10,00 perangkat Daerah	10.620.049	40 perangkat Daerah	37.030.539	Bappeda	

		5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			10,00 laporan	22.169.000	10,00 laporan	24.385.900	10,00 laporan	26.824.490	10,00 laporan	29.506.939	40 laporan	102.886.329	Bappeda	
		5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			2,00 laporan	180.000.000	2,00 laporan	198.000.000	2,00 laporan	217.800.000	2,00 laporan	239.580.000	8 laporan	835.380.000	Bappeda	
		5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			3,00 dokumen	50.345.000	3,00 dokumen	55.379.500	3,00 dokumen	60.917.450	3,00 dokumen	67.009.195	12 dokumen	233.651.145	Bappeda	
		5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			5,00 Perangkat Daerah	7.164.500	5,00 Perangkat Daerah	7.880.950	5,00 Perangkat Daerah	8.669.045	5,00 Perangkat Daerah	9.535.950	20 Perangkat Daerah	33.250.445	Bappeda	
		5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			5,00 Perangkat Daerah	20.663.000	5,00 Perangkat Daerah	22.729.300	5,00 Perangkat Daerah	25.002.230	5,00 Perangkat Daerah	27.502.453	20 Perangkat Daerah	95.896.983	Bappeda	
		5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			3,00 laporan	206.621.500	3,00 laporan	227.283.650	3,00 laporan	250.012.015	3,00 laporan	275.013.217	12 laporan	958.930.382	Bappeda	
		5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		0		0 0	472.550.600	0 0	523.235.530	0 0	575.558.983	0 0	633.114.953	0 0	2.204.460.066	Bappeda	
		5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			3,00 dokumen	68.615.000	3,00 dokumen	78.907.250	3,00 dokumen	86.797.975	3,00 dokumen	95.477.773	12 dokumen	329.797.998	Bappeda	
		5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			6,00 perangkat daerah	6.183.000	6,00 perangkat daerah	6.801.300	6,00 perangkat daerah	7.481.430	6,00 perangkat daerah	8.229.573	24 perangkat daerah	28.695.303	Bappeda	
		5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			6,00 perangkat daerah	37.732.000	6,00 perangkat daerah	41.505.200	6,00 perangkat daerah	45.655.720	6,00 perangkat daerah	50.221.292	24 perangkat daerah	175.114.212	Bappeda	
		5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1,00 laporan	161.365.000	1,00 laporan	177.501.500	1,00 laporan	195.251.650	1,00 laporan	214.776.815	4 laporan	748.894.965	Bappeda	
		5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1,00 dokumen	75.388.500	4,00 dokumen	82.927.000	4,00 dokumen	91.220.000	4,00 dokumen	100.342.000	13 dokumen	349.877.500	Bappeda	
		5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			3,00 perangkat daerah	12.669.800	8,00 perangkat daerah	13.936.780	8,00 perangkat daerah	15.330.458	8,00 perangkat daerah	16.863.500	27 perangkat daerah	58.800.538	Bappeda	

